

Tantangan Sistem Administrasi Negara Menghadapi Era Society 5.0

Alnesa Adhia Putri^{1*}, Cika Nurcahyati Jusmi², Risvandi³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Riau, Indonesia

Email : alnesaadhiaputri@gmail.com^{1*}

Article Info

Keywords:

Sistem Administrasi Negara;
Society 5.0;
Transformasi Digital;
Reformasi Birokrasi;
Pelayanan Publik

This is an open access article under the

[CC BY-SA](#) license



Abstract

Era Society 5.0 menempatkan teknologi digital sebagai sarana untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berpusat pada manusia. Perubahan tersebut menuntut sistem administrasi negara bergerak dari pola birokrasi prosedural menuju pelayanan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, prosiding, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan administrasi negara, reformasi birokrasi, e-government, SPBE, dan transformasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa administrasi negara menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu rendahnya kesiapan sumber daya aparatur, budaya birokrasi yang lambat berubah, kesenjangan infrastruktur digital, lemahnya integrasi data, serta risiko keamanan informasi publik. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup dilakukan melalui penyediaan aplikasi, tetapi harus disertai pembaruan kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, perlindungan data pribadi, pemerataan akses, dan koordinasi antarlembaga. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan administrasi negara menghadapi Society 5.0 ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyeimbangkan teknologi, regulasi, kapasitas birokrasi, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi administrasi negara perlu diarahkan pada tata kelola yang humanis, inklusif, akuntabel, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan layanan mudah, terjangkau, jelas, serta terlindungi dari risiko ketimpangan akses dan penyalahgunaan data publik dalam praktik pemerintahan digital nasional di masa mendatang.

1. Pendahuluan

Perubahan teknologi digital telah menggeser cara negara menjalankan fungsi administrasi, pelayanan, dan pengambilan keputusan publik. Era Society 5.0 menempatkan teknologi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berpusat pada manusia melalui integrasi ruang fisik dan ruang digital (Deguchi et al., 2020). Gagasan tersebut menuntut pemerintah tidak hanya mengejar modernisasi perangkat, tetapi juga memastikan bahwa kecerdasan buatan, Internet of Things, dan big data benar-benar memperbaiki kesejahteraan warga, mengurangi kesenjangan layanan, serta mempercepat penyelesaian masalah sosial secara lebih terukur (Narvaez Rojas et al., 2021).

Sistem administrasi negara memiliki kedudukan penting karena menjadi perangkat penyelenggara tujuan negara, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan kelembagaan, sampai pelayanan masyarakat. Di Indonesia, sistem tersebut tidak dapat dilepaskan dari dasar konstitusional, hubungan antarlembaga, serta kebutuhan pembangunan nasional yang terus berubah (Sakti, 2020). Ketika masyarakat bergerak menuju pola hidup digital, administrasi negara dituntut lebih responsif, transparan, efisien, dan mampu bekerja lintas sektor tanpa kehilangan orientasi pada kepentingan publik. Perubahan tersebut menempatkan birokrasi sebagai aktor utama yang harus mampu menerjemahkan inovasi teknologi ke dalam pelayanan nyata.

Tantangan utama muncul karena transformasi menuju Society 5.0 tidak sama dengan memindahkan layanan manual ke aplikasi digital. E-government memang dapat meningkatkan efisiensi organisasi, memperluas akses layanan, dan mendukung keberlanjutan pelayanan publik, tetapi manfaat tersebut hanya dapat dicapai jika perubahan teknologi disertai perubahan tata kelola (Sugiono, 2021). Tanpa desain kelembagaan yang kuat, digitalisasi berpotensi hanya menghasilkan

prosedur baru yang tetap lambat, terfragmentasi, dan sulit diakses oleh masyarakat, terutama kelompok yang belum memiliki literasi digital memadai.

Persoalan lain terletak pada kesiapan birokrasi dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi menuju Society 5.0 mensyaratkan aparatur yang kompeten, berintegritas, serta mampu menggunakan teknologi dalam pelayanan publik. Namun, penelitian menunjukkan masih terdapat hambatan berupa patologi birokrasi, budaya koruptif, dan ketidaksiapan birokrasi dalam penggunaan teknologi informasi (Yasa et al., 2021). Kondisi tersebut diperkuat oleh kebutuhan perubahan budaya organisasi, pelatihan teknologi, dan pengawasan birokrasi yang lebih serius (Wulandari, 2023). Artinya, tantangan administrasi negara bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan mentalitas kerja dan kapasitas kelembagaan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan integrasi sistem, keamanan data, dan pemerataan akses layanan. Transformasi digital pemerintahan Indonesia melalui SPBE dan Kebijakan Satu Data diarahkan untuk membangun sistem yang terhubung, meningkatkan efisiensi, memperkuat akuntabilitas pelayanan publik (Nasution et al., 2024). Namun, penerapan teknologi pada tingkat lokal masih menghadapi masalah privasi, keamanan data, dan kebutuhan strategi digital yang inklusif (Alfarizi, 2024). Perlindungan data pribadi dalam SPBE juga masih memerlukan kerangka hukum kuat agar pemanfaatan data tidak disalahgunakan (Rahman, 2021). Keadaan tersebut menunjukkan perlunya keselarasan antara regulasi, infrastruktur, dan kemampuan pelaksana layanan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan sistem administrasi negara dalam menghadapi era Society 5.0, terutama pada aspek birokrasi, sumber daya aparatur, integrasi layanan digital, keamanan data, dan pemerataan akses publik. Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu administrasi negara, serta manfaat praktis bagi pemerintah dalam menyusun strategi tata kelola digital yang adaptif, akuntabel, inklusif, dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai Society 5.0 tidak berhenti pada isu teknologi, tetapi menyentuh kualitas tata kelola negara secara adil, efektif, dan berkelanjutan bagi publik luas

2. Tinjauan Pustaka

A. Sistem Administrasi Negara

Sistem administrasi negara merupakan keseluruhan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kelembagaan, aparatur, aturan kerja, proses kebijakan, serta pelayanan kepada masyarakat. Sistem tersebut berfungsi menerjemahkan tujuan negara ke dalam tindakan administratif yang nyata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, sampai pengawasan program publik. Sakti menjelaskan bahwa administrasi negara Indonesia berkaitan dengan dasar negara, konstitusi, hubungan antarlembaga, dan kebutuhan pembangunan nasional yang terus bergerak mengikuti perubahan masyarakat (Sakti, 2020). Karena itu, sistem administrasi negara tidak boleh dipahami hanya sebagai urusan kantor pemerintahan, tetapi sebagai instrumen utama untuk memastikan kebijakan publik berjalan tertib, sah, dan bermanfaat bagi warga.

Perkembangan administrasi negara modern menunjukkan bahwa birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi administrasi publik dipandang sebagai wujud reformasi birokrasi karena mampu memperbaiki performa layanan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat proses kerja pemerintahan (Afdila & Adnan, 2022). Namun, perubahan tersebut tetap membutuhkan aparatur yang memiliki keterampilan digital, integritas, serta kemampuan memahami kebutuhan masyarakat. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, sistem digital berisiko hanya mengganti bentuk pelayanan tanpa memperbaiki kualitas administrasi.

Dalam era Society 5.0, sistem administrasi negara juga perlu bergerak menuju tata kelola yang lebih kolaboratif dan berbasis data. Kajian bibliometrik terbaru menunjukkan bahwa administrasi publik global semakin mengarah pada digital governance dan collaborative governance, terutama setelah pelayanan publik banyak terdorong oleh penggunaan teknologi digital (Nasution et al., 2025). Sejalan dengan itu, penguatan reformasi birokrasi di Indonesia diperlukan untuk mengatasi patologi birokrasi, resistensi kelembagaan, dan lemahnya kapasitas aparatur secara konsisten, terukur, adil, dan berorientasi pada warga luas (Yasa et al., 2021).

B. Konsep Society 5.0 dalam Pemerintahan

Society 5.0 merupakan konsep masyarakat cerdas yang menempatkan manusia sebagai pusat penggunaan teknologi. Gagasan ini lahir dari Jepang sebagai tahap perkembangan masyarakat setelah masyarakat berburu, agraris, industri, dan informasi. Deguchi et al. menjelaskan bahwa Society 5.0 berupaya menghubungkan ruang fisik dan ruang siber agar data, teknologi, serta pengetahuan dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan sosial secara lebih tepat (Deguchi et al., 2020). Dengan demikian, Society 5.0 tidak dapat dipahami hanya sebagai kemajuan perangkat digital, tetapi sebagai cara baru mengatur hubungan antara teknologi, manusia, dan kesejahteraan publik.

Dalam pemerintahan, konsep Society 5.0 menuntut negara menggunakan teknologi untuk memperbaiki kualitas pelayanan, bukan sekadar memperbanyak aplikasi. Fukuda menegaskan bahwa Society 5.0 membutuhkan ekosistem inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu menghubungkan pemerintah, industri, akademisi, serta masyarakat (Fukuda, 2020). Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa e-government dapat mendorong efisiensi, pemerataan akses, dan keberlanjutan pelayanan publik apabila diarahkan pada kebutuhan masyarakat (Sugiono, 2021). Karena itu, pemerintahan pada era Society 5.0 harus mampu membangun layanan yang mudah diakses, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan warga.

Perbedaan penting antara Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0 terletak pada orientasinya. Industri 4.0 lebih menekankan otomatisasi, konektivitas mesin, dan efisiensi produksi, sedangkan Society 5.0 menekankan penggunaan teknologi untuk kesejahteraan manusia, keberlanjutan, dan ketahanan sosial (Mourtzis et al., 2022). Bagi administrasi negara, perbedaan ini penting karena digitalisasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada modernisasi prosedur. Pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi memperkuat keadilan layanan, memperkecil kesenjangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat secara nyata. Arah tersebut menjadi dasar teoritis bagi pembaruan administrasi negara masa kini Indonesia.

C. Transformasi Digital dalam Administrasi Negara

Transformasi digital dalam administrasi negara merupakan proses perubahan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki prosedur kerja, pengelolaan data, dan pelayanan publik. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan aplikasi, tetapi juga menyentuh struktur organisasi, budaya kerja, kompetensi aparatur, dan pola hubungan pemerintah dengan masyarakat. Tangi et al. menegaskan bahwa transformasi pemerintahan digital dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat yang berkaitan dengan organisasi, teknologi, serta kemampuan lembaga publik dalam mengelola perubahan (Tangi et al., 2021). Oleh karena itu, digitalisasi administrasi negara harus dipandang sebagai reformasi tata kelola, bukan sekadar modernisasi alat kerja.

Di Indonesia, transformasi digital administrasi negara tercermin melalui pengembangan e-government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun pelayanan yang lebih efisien, transparan, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sugiono menjelaskan bahwa e-government dapat mendukung Society 5.0 apabila layanan digital dikelola secara berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan sosial, ekonomi, serta lingkungan (Sugiono, 2021). Temuan lain menunjukkan bahwa lompatan digital Indonesia dari birokrasi menuju pemanfaatan big data memerlukan integrasi sistem, tata kelola data, dan koordinasi antarlembaga yang kuat (Nasution et al., 2024). Dengan dasar tersebut, administrasi negara dituntut mengubah proses pelayanan dari pola sektoral menuju layanan terpadu berbasis data.

Namun, transformasi digital tidak selalu berjalan mulus karena organisasi publik sering menghadapi resistensi, keterbatasan kemampuan aparatur, dan perbedaan kesiapan antarinstansi. Moser-Plautz dan Schmidhuber menunjukkan bahwa transformasi pemerintahan digital tidak hanya meningkatkan penggunaan teknologi, tetapi juga mengubah sikap pegawai, budaya inovasi, dan cara organisasi merespons tekanan eksternal (Moser-Plautz & Schmidhuber, 2023). Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa digitalisasi administrasi publik membutuhkan kesiapan sumber daya manusia agar teknologi tidak berhenti sebagai prosedur formal (Afdila & Adnan, 2022). Maka, keberhasilan transformasi digital administrasi negara sangat bergantung pada keselarasan teknologi,

kelembagaan, regulasi, serta kapasitas aparatur publik. Arah tersebut penting agar pelayanan digital tetap adil, inklusif, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas Indonesia.

D. Tantangan Sistem Administrasi Negara Pada Era Society 5.0

Tantangan sistem administrasi negara pada era Society 5.0 tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan negara mengelola perubahan secara adil dan terarah. Digitalisasi pelayanan publik dapat mempercepat akses warga, namun kesenjangan digital masih menjadi hambatan serius dalam penerapan e-government di Indonesia. Sutrisno et al. menemukan bahwa perbedaan akses, literasi digital, dan kemampuan menggunakan teknologi memengaruhi pemanfaatan layanan publik digital, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem daring (Sutrisno et al., 2024). Akibatnya, layanan digital yang seharusnya mempermudah masyarakat justru berpotensi menciptakan jarak baru antara warga yang terhubung dan warga yang tertinggal, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Tantangan berikutnya berada pada kesiapan aparatur dan integrasi sistem pemerintahan. Implementasi e-government di Indonesia masih menghadapi kendala berupa kurangnya integrasi data, rendahnya partisipasi publik, serta lemahnya pemahaman teknis dan keamanan informasi di kalangan sumber daya manusia, terutama aparatur sipil negara (Nurhidayat et al., 2024). Temuan tersebut selaras dengan pandangan bahwa reformasi birokrasi menuju Society 5.0 membutuhkan aparatur yang adaptif, kompeten, dan bebas dari patologi birokrasi (Yasa et al., 2021). Tanpa perubahan kapasitas aparatur, teknologi hanya menjadi instrumen administratif yang belum tentu meningkatkan kualitas keputusan dan pelayanan publik secara konsisten pada semua level pemerintahan.

Tantangan lain menyangkut keamanan data, budaya organisasi, dan konsistensi regulasi. Penggunaan big data dan sistem layanan terintegrasi membutuhkan perlindungan data pribadi agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak menurun (Rahman, 2021). Pada saat yang sama, budaya birokrasi yang lambat berubah dapat menghambat inovasi pelayanan, meskipun kebijakan digital telah tersedia (Wulandari, 2023). Oleh karena itu, administrasi negara perlu memperkuat infrastruktur, literasi digital, tata kelola data, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga agar transformasi Society 5.0 tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi dasar pelayanan publik yang inklusif, aman, dan akuntabel. Kualitas perubahan harus diukur dari manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar jumlah aplikasi yang dibangun pemerintah secara merata dan berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode tersebut dipilih karena pembahasan tidak bertumpu pada data lapangan, melainkan pada telaah terhadap buku, artikel jurnal, prosiding, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan sistem administrasi negara, transformasi digital pemerintahan, e-government, reformasi birokrasi, dan Society 5.0. Studi literatur dapat digunakan sebagai penelitian mandiri karena mampu menyusun, menilai, dan mensintesis pengetahuan terdahulu untuk membangun pemahaman konseptual yang lebih kuat terhadap suatu persoalan (Kraus et al., 2022). Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak sekadar mengumpulkan pendapat para penulis, tetapi juga membandingkan gagasan, menemukan hubungan antarkonsep, serta melihat kesenjangan antara teori administrasi negara dan kebutuhan pemerintahan digital.

Sumber data dalam penelitian berasal dari literatur ilmiah yang memiliki hubungan langsung dengan tema penelitian. Pencarian sumber dilakukan melalui Google Scholar, Crossref, Directory of Open Access Journals, Garuda, SINTA, Springer, ScienceDirect, dan laman jurnal resmi. Kata kunci yang digunakan meliputi “sistem administrasi negara”, “Society 5.0”, “digital government”, “e-government”, “public administration”, “bureaucratic reform”, “SPBE”, dan “digital public service”. Literatur yang digunakan diutamakan terbit dalam tujuh tahun terakhir agar pembahasan sesuai dengan perkembangan mutakhir administrasi publik dan teknologi pemerintahan. Prinsip pelaporan yang transparan diperlukan agar proses pencarian dan penggunaan sumber dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Page et al., 2021).

Pemilihan literatur dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian isi sumber terhadap fokus kajian. Sumber yang digunakan bukan hanya dipilih karena tahun terbitnya baru, tetapi juga karena

memuat pembahasan yang mendukung analisis mengenai administrasi negara pada era Society 5.0. Artikel yang membahas konsep Society 5.0 digunakan untuk memperjelas dasar pemikiran masyarakat cerdas yang berpusat pada manusia. Literatur tentang administrasi publik dan reformasi birokrasi digunakan untuk menjelaskan posisi negara dalam mengelola perubahan kelembagaan. Sementara itu, sumber mengenai digital government dan e-government digunakan untuk memahami tantangan pelayanan publik berbasis teknologi. Pedoman scoping review menekankan bahwa pemetaan sumber membantu peneliti memahami keluasan konsep, arah pembahasan, dan hubungan antartema dalam suatu bidang kajian (Peters et al., 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur. Setiap sumber yang relevan dicatat berdasarkan nama penulis, tahun terbit, judul, jenis publikasi, fokus pembahasan, temuan utama, dan keterkaitannya dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu konsep sistem administrasi negara, konsep Society 5.0, transformasi digital administrasi negara, serta tantangan birokrasi pada era digital. Pengelompokan tersebut membantu peneliti menyusun alur pembahasan secara teratur dan menghindari pengulangan gagasan. Paul dan Criado menyatakan bahwa kajian literatur harus menunjukkan sintesis, bukan hanya daftar ringkasan sumber, agar kontribusi penelitian menjadi lebih jelas (Paul & Criado, 2020).

Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis. Reduksi dilakukan dengan memilih informasi yang benar-benar berkaitan dengan fokus penelitian. Klasifikasi dilakukan dengan menempatkan data ke dalam tema pembahasan yang telah ditentukan. Interpretasi digunakan untuk memahami hubungan antara teori, temuan penelitian terdahulu, dan persoalan administrasi negara pada era Society 5.0. Sintesis dilakukan dengan menyusun gagasan dari berbagai sumber untuk membangun argumentasi penelitian. Randles dan Finnegan menjelaskan bahwa kajian literatur yang baik memerlukan pertanyaan yang jelas, strategi pencarian yang terarah, penilaian sumber yang cermat, serta penyajian hasil yang logis (Randles & Finnegan, 2023).

Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan silang antar sumber, kesesuaian antara isi literatur dan fokus penelitian, serta ketelusuran asal publikasi. Sumber yang memiliki kesamaan gagasan dibandingkan untuk melihat konsistensi temuan, sedangkan sumber yang berbeda pandangan digunakan untuk memperkaya analisis. Langkah tersebut dilakukan agar penelitian menghasilkan uraian yang objektif, sistematis, dan tidak bertumpu pada satu pendapat. Metode studi literatur membantu penelitian menempatkan Society 5.0 sebagai persoalan tata kelola negara, bukan sekadar isu teknologi. Dengan cara tersebut, penelitian dapat menjelaskan tantangan, peluang, dan arah pembaruan administrasi negara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital Indonesia secara berkelanjutan. Penguatan metode tersebut juga menjaga ketajaman analisis agar hasil penelitian lebih relevan bagi pengembangan administrasi negara modern di Indonesia kontemporer.

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Perubahan Arah Sistem Administrasi Negara pada Era Society 5.0

Perubahan arah sistem administrasi negara pada era Society 5.0 terlihat dari pergeseran birokrasi yang semula berorientasi pada prosedur menuju tata kelola yang lebih adaptif, digital, dan berpusat pada warga. Sistem administrasi negara tetap berfungsi sebagai perangkat untuk menjalankan tujuan negara, tetapi cara kerjanya tidak dapat lagi bertumpu pada pola administratif yang lambat dan sektoral (Sakti, 2020). Society 5.0 menuntut pemerintah memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial, memperbaiki layanan, dan menjaga keseimbangan antara inovasi digital dengan kebutuhan manusia (Deguchi et al., 2020).

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa transformasi digital mendorong administrasi negara berubah dari layanan berbasis kantor menuju layanan berbasis data dan jaringan. Novianto menjelaskan bahwa transformasi digital sektor publik dipengaruhi oleh unsur eksternal, organisasi, warga, dan teknologi sehingga perubahan administrasi tidak hanya ditentukan oleh perangkat digital, tetapi juga oleh desain kelembagaan dan kebutuhan pengguna layanan (Novianto, 2023). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa administrasi negara perlu menempatkan warga sebagai penerima manfaat utama, bukan sekadar objek pelayanan.

Perubahan arah juga tampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap pemerintahan yang lincah dan kolaboratif. Lukman dan Hakim menemukan bahwa *agile governance*, transformasi

digital, dan pengambilan keputusan inklusif berkontribusi terhadap kepuasan warga terhadap layanan publik di Indonesia (Lukman & Hakim, 2024). Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa administrasi publik semakin bergerak ke arah *digital governance* dan *collaborative governance* (Nasution et al., 2025). Dengan kata lain, keberhasilan administrasi negara pada era Society 5.0 bergantung pada kemampuan birokrasi bekerja lintas sektor, merespons perubahan, dan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan secara terbuka.

Arah baru administrasi negara juga menuntut perubahan yang lebih dalam daripada digitalisasi prosedur. Haug et al. menegaskan bahwa perubahan digital di sektor publik dapat bersifat bertahap maupun transformatif, bergantung pada bagaimana organisasi mengelola proses, aktor, dan hasil perubahan (Haug et al., 2024). Karena itu, penggunaan *e-government* perlu diarahkan untuk memperkuat efisiensi, keberlanjutan, dan orientasi pelayanan publik (Sugiono, 2021). Temuan tersebut menunjukkan bahwa Society 5.0 mendorong administrasi negara bergerak menuju tata kelola yang responsif, terintegrasi, kolaboratif, dan humanis bagi masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut menjadi dasar penting bagi pembaruan birokrasi, penyusunan kebijakan berbasis data, dan peningkatan kualitas pelayanan publik nasional secara lebih merata, aman, akuntabel, serta mudah diakses oleh seluruh warga.

B. Tantangan Kesiapan Birokrasi dan Sumber Daya Aparatur

Kesiapan birokrasi dan sumber daya aparatur menjadi hasil penting dalam telaah literatur karena transformasi menuju Society 5.0 sangat bergantung pada manusia yang menjalankan sistem pemerintahan. Teknologi digital dapat menyediakan kanal pelayanan yang cepat, tetapi kualitas layanan tetap ditentukan oleh aparatur yang memahami prosedur, mampu menggunakan sistem, dan memiliki kemauan beradaptasi. Yasa et al. menekankan bahwa reformasi birokrasi menuju Society 5.0 masih menghadapi patologi organisasi, budaya kerja lama, dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur (Yasa et al., 2021). Artinya, tantangan birokrasi tidak semata berada pada ketersediaan aplikasi, melainkan pada kesiapan organisasi publik untuk mengubah pola kerja.

Literatur menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan digital ASN di Indonesia. Silitonga menemukan bahwa literasi digital ASN berhubungan dengan kemampuan sektor publik menjalankan transformasi digital, tetapi masih terdapat kesenjangan kemampuan antarpegawai dan antargenerasi (Silitonga, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa aparatur tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok yang seragam. Sebagian pegawai mungkin telah terbiasa dengan sistem digital, sedangkan sebagian lain masih membutuhkan pendampingan teknis, pelatihan, dan ruang belajar yang berkelanjutan. Afdila dan Adnan juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi publik membutuhkan kesiapan sumber daya manusia agar reformasi birokrasi tidak berhenti pada perubahan bentuk layanan (Afdila & Adnan, 2022).

Hasil literatur lain memperlihatkan bahwa kompetensi digital ASN tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga menyangkut cara berpikir, kolaborasi, keamanan data, dan pemecahan masalah. Sarjito dan Djati menjelaskan bahwa kompetensi digital ASN milenial dapat mendorong efisiensi kerja, percepatan adopsi teknologi, dan pembentukan budaya kerja yang lebih kolaboratif, tetapi keberhasilannya tetap membutuhkan dukungan struktur birokrasi yang adaptif (Sarjito & Djati, 2025). Dengan demikian, potensi aparatur muda tidak akan optimal apabila sistem kerja masih terlalu hierarkis, kaku, dan kurang memberi ruang inovasi.

Keterkaitan antara kompetensi digital dan kinerja aparatur juga diperkuat oleh penelitian Setyawan et al. yang menemukan hubungan positif antara tingkat kompetensi digital dan kinerja ASN (Setyawan et al., 2025). Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa peningkatan kualitas ASN dapat berdampak langsung pada keberhasilan pelayanan digital. Wulandari menyatakan bahwa penguatan reformasi birokrasi membutuhkan perubahan budaya organisasi dan peningkatan kapasitas aparatur secara konsisten (Wulandari, 2023). Berdasarkan sintesis tersebut, tantangan kesiapan birokrasi dan SDM aparatur terletak pada kesenjangan keterampilan, resistensi budaya kerja, lemahnya dukungan kelembagaan, serta kebutuhan pembelajaran digital berkelanjutan secara merata. Jika kelemahan tersebut tidak ditangani, digitalisasi berisiko menghasilkan prosedur baru yang tetap lambat, tidak ramah pengguna, dan sulit membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Maka, strategi aparatur perlu diarahkan pada pelatihan praktis, kepemimpinan adaptif, evaluasi kinerja, serta kolaborasi lintas generasi dalam organisasi publik.

C. Tantangan Infrastruktur, Integrasi Data, dan Keamanan Digital

Tantangan infrastruktur, integrasi data, dan keamanan digital menjadi temuan penting karena administrasi negara pada era Society 5.0 bergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan layanan yang terhubung, stabil, dan aman. Infrastruktur digital tidak hanya berarti jaringan internet, tetapi juga mencakup pusat data, perangkat layanan, sistem aplikasi, dan kemampuan daerah mengoperasikan teknologi pemerintahan. Kencono et al. menemukan bahwa implementasi SPBE di Indonesia masih menghadapi masalah ketersediaan infrastruktur TIK, kepemimpinan, budaya kerja, serta kebutuhan integrasi Pusat Data Nasional sebagai fondasi *big data* pemerintahan (Kencono et al., 2024). Temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian sebelumnya bahwa kesenjangan akses digital dapat memengaruhi pemanfaatan layanan publik berbasis *e-government* (Sutrisno et al., 2024).

Masalah integrasi data juga menjadi hambatan serius dalam pengembangan administrasi negara digital. Sistem pemerintahan yang belum saling terhubung menyebabkan data publik tersebar pada banyak instansi, sulit diperbarui, dan tidak selalu konsisten. Nasution et al. menjelaskan bahwa lompatan digital Indonesia menuju penggunaan *big data* membutuhkan integrasi sistem dan tata kelola data yang kuat (Nasution et al., 2024). Zainudin menunjukkan bahwa kebijakan Identitas Kependudukan Digital dapat mendukung SPBE dan integrasi pelayanan publik, tetapi adopsinya belum optimal karena masih membutuhkan literasi digital, perlindungan data pribadi, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi publik yang inklusif (Zainudin, 2025).

Keamanan digital menjadi tantangan berikutnya karena layanan administrasi negara mengelola data warga dalam jumlah besar. Sun et al. menegaskan bahwa *big data* telah menjadi sumber daya strategis, tetapi peningkatan penggunaan data juga diikuti oleh meningkatnya masalah keamanan, privasi, dan tata kelola data (Sun et al., 2021). Dalam administrasi negara, risiko kebocoran data, penyalahgunaan identitas, serangan siber, dan lemahnya audit sistem dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Karena itu, perlindungan data pribadi perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata kelola SPBE, bukan hanya urusan teknis keamanan informasi (Rahman, 2021).

Berdasarkan sintesis literatur, tantangan infrastruktur, integrasi data, dan keamanan digital saling berhubungan. Infrastruktur yang belum merata dapat membatasi akses layanan, integrasi data yang lemah dapat memperlambat keputusan, sedangkan keamanan yang rapuh dapat merusak legitimasi pelayanan publik. Nurhidayat et al. juga menunjukkan bahwa implementasi *e-government* Indonesia masih menghadapi hambatan pada integrasi, partisipasi publik, pemahaman teknis, dan keamanan informasi (Nurhidayat et al., 2024). Maka, administrasi negara perlu memperkuat pemerataan infrastruktur, interoperabilitas sistem, tata kelola data, dan keamanan digital agar Society 5.0 dapat menghasilkan layanan publik yang inklusif, tepercaya, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia. Penguatan tersebut juga membantu pemerintah mengurangi fragmentasi layanan, mempercepat respons kebijakan, dan menjaga keadilan akses digital antarwilayah secara lebih konsisten nasional dan transparan.

D. Arah Strategi Administrasi Negara dalam Menghadapi Society 5.0

Arah strategi administrasi negara dalam menghadapi Society 5.0 perlu bertumpu pada pembaruan tata kelola, bukan hanya penambahan aplikasi digital. Hasil literatur menunjukkan bahwa transformasi pemerintahan digital harus diarahkan untuk menciptakan nilai publik melalui layanan yang lebih mudah, terbuka, responsif, dan dapat dipercaya. Liva et al. menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan mencakup perubahan layanan, pengambilan kebijakan, tata kelola data, dan hubungan pemerintah dengan warga (Liva et al., 2020). Dengan demikian, strategi administrasi negara harus menghubungkan teknologi dengan kebutuhan publik, bukan menjadikan teknologi sebagai tujuan administratif yang berdiri sendiri.

Strategi pertama adalah memperkuat orientasi nilai publik dalam pelayanan digital. Mensah et al. menunjukkan bahwa nilai publik *e-government* dipengaruhi oleh kualitas informasi, kualitas layanan, efisiensi, keterbukaan, responsivitas, dan orientasi pengguna (Mensah et al., 2022). Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa *e-government* pada era Society 5.0 harus mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sugiono, 2021). Karena itu, layanan digital perlu

dirancang berdasarkan pengalaman warga, kemudahan akses, kejelasan informasi, serta mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat ikut menilai kualitas pelayanan.

Strategi kedua berkaitan dengan inovasi birokrasi dan kemampuan organisasi publik beradaptasi. Guenduez et al. mengidentifikasi empat strategi inovasi digital sektor publik, yaitu *enhancement-oriented*, *anticipatory*, *adaptive*, dan *persistent*, yang menunjukkan bahwa organisasi publik dapat memperbaiki layanan secara bertahap sekaligus menyiapkan perubahan jangka panjang (Guenduez et al., 2025). Pada administrasi negara Indonesia, strategi ini perlu diterjemahkan melalui pelatihan aparatur, kepemimpinan adaptif, penguatan kolaborasi, dan reformasi budaya kerja. Hal ini penting karena kesiapan SDM aparatur masih menjadi tantangan utama dalam transformasi digital pemerintahan (Yasa et al., 2021).

Strategi ketiga adalah memperkuat integrasi data, keamanan digital, dan koordinasi antarlembaga. SPBE, kebijakan satu data, serta perlindungan data pribadi perlu dijalankan secara terpadu agar pelayanan publik tidak terpecah oleh ego sektoral (Nasution et al., 2024; Rahman, 2021). Berdasarkan sintesis tersebut, administrasi negara perlu membangun tata kelola yang *human-centered*, inklusif, berbasis data, aman, kolaboratif, dan berkelanjutan. Strategi ini menjadi penting agar Society 5.0 tidak berhenti sebagai wacana teknologi, tetapi menjadi arah pembaruan birokrasi yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata di berbagai wilayah, termasuk kelompok rentan yang sering tertinggal dalam akses layanan digital pemerintahan modern secara adil, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

Society 5.0 dalam administrasi negara menunjukkan bahwa perubahan birokrasi tidak dapat dibaca sebagai pemindahan layanan manual ke sistem digital semata. Inti perubahan terletak pada cara negara menggunakan teknologi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mempercepat respons kebijakan, dan menjaga hubungan pelayanan yang manusiawi. Deguchi et al. menempatkan Society 5.0 sebagai masyarakat yang menghubungkan ruang fisik dan ruang siber untuk menyelesaikan persoalan sosial secara lebih tepat (Deguchi et al., 2020). Gagasan ini sejalan dengan Narvaez Rojas et al. yang memandang Society 5.0 sebagai konsep masyarakat cerdas yang mengutamakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepentingan manusia (Narvaez Rojas et al., 2021). Karena itu, administrasi negara perlu menghindari cara berpikir yang terlalu teknosentris. Digitalisasi tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang lebih baik apabila proses kebijakan, kapasitas aparatur, dan akses masyarakat belum diperbaiki. Pembahasan hasil penelitian memperlihatkan bahwa Society 5.0 menuntut perubahan paradigma dari birokrasi berbasis prosedur menuju tata kelola yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada nilai publik. Perubahan ini penting karena keberhasilan negara tidak lagi hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari kemampuan layanan menjawab kebutuhan warga secara cepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pergeseran tersebut menempatkan sistem administrasi negara sebagai instrumen strategis untuk menghubungkan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan warga. Sakti menjelaskan bahwa administrasi negara Indonesia berkaitan dengan dasar negara, konstitusi, hubungan kelembagaan, dan kebutuhan pembangunan nasional (Sakti, 2020). Dalam era digital, fungsi tersebut menjadi lebih kompleks karena masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, terbuka, dan mudah diakses. Sugiono menegaskan bahwa e-government dapat mendukung Society 5.0 apabila diarahkan pada keberlanjutan dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar efisiensi teknis (Sugiono, 2021). Hasil penelitian pada bagian sebelumnya juga menunjukkan bahwa administrasi publik semakin bergerak menuju digital governance dan collaborative governance (Nasution et al., 2025). Pandangan ini diperkuat oleh Mergel et al. yang menyatakan bahwa pendekatan agile dapat membuat organisasi publik lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan layanan (Mergel et al., 2021). Dengan demikian, pembaruan administrasi negara perlu menata ulang proses kerja birokrasi agar lebih lincah, lintas sektor, dan mampu menghasilkan keputusan berbasis data. Tanpa penataan tersebut, digitalisasi hanya mempercepat prosedur yang sebenarnya belum efisien, sehingga manfaatnya bagi warga menjadi terbatas dan tidak merata.

Namun, perubahan paradigma tersebut tidak akan berjalan kuat apabila kesiapan birokrasi dan sumber daya aparatur masih tertinggal. Yasa et al. menunjukkan bahwa reformasi birokrasi

menuju Society 5.0 di Indonesia masih menghadapi patologi organisasi, resistensi perubahan, dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur (Yasa et al., 2021). Persoalan ini menjadi penting karena teknologi hanya dapat bekerja efektif jika aparatur mampu menggunakannya secara tepat. Silitonga menemukan adanya kesenjangan keterampilan digital dalam sektor publik Indonesia, baik antarpegawai maupun antargenerasi (Silitonga, 2023). Sarjito dan Djati juga menekankan bahwa kompetensi digital ASN perlu didukung struktur organisasi yang adaptif agar tidak berhenti pada kemampuan teknis individu (Sarjito & Djati, 2025). Jika birokrasi masih mempertahankan pola kerja hierarkis, lambat, dan terlalu administratif, layanan digital akan menghasilkan bentuk baru dari masalah lama. Aplikasi dapat tersedia, tetapi respons pelayanan tetap lambat. Sistem dapat terhubung, tetapi keputusan tetap tertunda karena koordinasi lemah. Oleh sebab itu, pembahasan ini menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya digitalisasi perangkat, melainkan transformasi mentalitas kerja, kepemimpinan, dan budaya pelayanan. Aparatur perlu dibangun sebagai pelayan publik yang mampu belajar, berkolaborasi, membaca data, dan mengambil keputusan secara etis.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan infrastruktur, integrasi data, keamanan digital, dan keadilan akses. Society 5.0 mengandaikan pelayanan berbasis data yang cepat dan terhubung, tetapi kondisi wilayah Indonesia yang beragam membuat kesiapan digital tidak merata. Sutrisno et al. menunjukkan bahwa kesenjangan digital memengaruhi pemanfaatan layanan publik, terutama bagi masyarakat yang memiliki akses dan literasi teknologi terbatas (Sutrisno et al., 2024). Kencono et al. juga menemukan bahwa SPBE masih menghadapi kendala infrastruktur TIK, kepemimpinan, budaya kerja, dan integrasi Pusat Data Nasional (Kencono et al., 2024). Pada sisi lain, integrasi data dan penggunaan big data memunculkan risiko keamanan serta perlindungan data pribadi. Rahman menekankan perlunya kerangka hukum perlindungan data dalam SPBE agar pemanfaatan informasi publik tidak merugikan warga (Rahman, 2021). Janssen dan van der Voort menjelaskan bahwa tata kelola adaptif membutuhkan keseimbangan antara kecepatan respons, analisis yang kuat, sentralisasi, desentralisasi, inovasi, dan stabilitas kelembagaan (Janssen & van der Voort, 2020). Dengan demikian, administrasi negara harus menjaga agar transformasi digital tidak memperlebar ketimpangan, melainkan memperkuat akses layanan yang aman, merata, dan akuntabel. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa integrasi data tidak mengabaikan hak warga, sebab kepercayaan publik merupakan syarat utama keberhasilan pelayanan digital. Jika keamanan, privasi, dan pemerataan akses diabaikan, Society 5.0 justru dapat melahirkan eksklusi baru dalam administrasi negara. Karena itu, kebijakan digital harus selalu disertai evaluasi, audit, dan edukasi publik agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pihak yang memahami hak serta risiko layanan digital negara secara sadar dan kritis.

Tabel 1. Sintesis Tantangan dan Strategi Sistem Administrasi Negara Menghadapi Society 5.0

Aspek	Tantangan Utama	Arah Strategi
SDM Aparatur	Literasi digital dan adaptasi aparatur belum merata	Pelatihan ASN, kepemimpinan adaptif, dan reformasi budaya kerja
Infrastruktur Digital	Akses jaringan dan fasilitas layanan belum merata antarwilayah	Pemerataan infrastruktur dan penguatan layanan digital inklusif
Integrasi Data	Sistem antarinstansi belum terhubung secara optimal	Penguatan SPBE, interoperabilitas data, dan koordinasi antarlembaga
Keamanan Data	Risiko kebocoran, penyalahgunaan data, dan lemahnya audit sistem	Perlindungan data pribadi dan audit keamanan digital berkala
Budaya Birokrasi	Pola kerja masih sektoral, hierarkis, dan lambat berubah	Tata kelola kolaboratif yang berpusat pada kebutuhan warga

Berdasarkan Tabel 1, tantangan administrasi negara pada era Society 5.0 tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan. Kesiapan SDM aparatur berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah mengoperasikan sistem digital, menjaga keamanan data, dan memberi layanan yang mudah dipahami warga. Infrastruktur yang belum merata juga dapat melemahkan tujuan pelayanan digital karena masyarakat di wilayah tertentu tetap menghadapi hambatan akses. Integrasi data yang

lemah akan memperpanjang proses administrasi, sedangkan keamanan yang rapuh dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan negara. Karena itu, strategi administrasi negara tidak cukup dilakukan secara parsial. Penguatan SPBE, pelatihan aparatur, interoperabilitas data, dan perlindungan data pribadi perlu dijalankan sebagai agenda terpadu. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa transformasi digital pemerintahan membutuhkan perubahan organisasi, tata kelola data, dan orientasi pelayanan yang jelas (Tangi et al., 2021). Digitalisasi juga harus diarahkan pada nilai publik agar layanan tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat (Mensah et al., 2022).

Pembahasan ini menunjukkan bahwa Society 5.0 seharusnya dipahami sebagai arah pembaruan administrasi negara yang berpusat pada manusia. Negara tidak hanya dituntut membangun aplikasi, tetapi juga memastikan bahwa teknologi memperkuat keadilan pelayanan, partisipasi warga, dan akuntabilitas birokrasi. Jika administrasi negara hanya mengejar inovasi teknis, maka perubahan digital berisiko menjadi simbol modernisasi tanpa menyelesaikan masalah dasar birokrasi. Sebaliknya, jika teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat pelayanan publik, Society 5.0 dapat menjadi peluang untuk membangun pemerintahan yang lebih adaptif dan inklusif. Penguatan reformasi birokrasi tetap penting karena perubahan digital membutuhkan aparatur yang kompeten, budaya kerja yang terbuka, dan kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan (Yasa et al., 2021; Wulandari, 2023). Dengan demikian, keberhasilan administrasi negara menghadapi Society 5.0 sangat bergantung pada keseimbangan antara teknologi, regulasi, kelembagaan, dan kebutuhan masyarakat. Arah pembaruan tersebut perlu dijalankan secara konsisten agar pelayanan publik Indonesia menjadi lebih aman, merata, kolaboratif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa tantangan sistem administrasi negara menghadapi era Society 5.0 tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik. Society 5.0 menuntut perubahan yang lebih mendasar, yaitu perubahan cara pemerintah merancang kebijakan, mengelola birokrasi, memanfaatkan data, dan melayani masyarakat. Sistem administrasi negara tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi, portal layanan, atau sistem elektronik, tetapi harus memastikan bahwa seluruh inovasi digital benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan demikian, teknologi perlu ditempatkan sebagai sarana untuk memperkuat pelayanan publik yang adil, responsif, transparan, dan berpusat pada kebutuhan manusia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan arah administrasi negara bergerak dari birokrasi prosedural menuju tata kelola digital yang lebih adaptif dan kolaboratif. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kebutuhan terhadap layanan berbasis data, pengambilan keputusan yang cepat, integrasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya mudah diwujudkan karena masih terdapat berbagai hambatan, terutama kesiapan sumber daya aparatur, budaya birokrasi yang lambat berubah, kesenjangan infrastruktur digital, belum optimalnya integrasi data, serta risiko keamanan informasi publik. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan memerlukan pembaruan kelembagaan, bukan hanya pembaruan perangkat teknis.

Kesiapan sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam keberhasilan administrasi negara pada era Society 5.0. Aparatur negara dituntut memiliki literasi digital, kemampuan analisis data, sikap adaptif, integritas, serta orientasi pelayanan publik. Tanpa kesiapan aparatur, sistem digital hanya akan menjadi prosedur baru yang tetap lambat, kaku, dan kurang ramah bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan digital, reformasi budaya kerja, kepemimpinan adaptif, serta evaluasi kinerja perlu diperkuat secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya dikuasai oleh kelompok aparatur tertentu, tetapi merata pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pemerataan infrastruktur, integrasi data, dan keamanan digital. Ketimpangan akses teknologi dapat menyebabkan layanan publik digital hanya efektif bagi masyarakat yang memiliki jaringan, perangkat, dan literasi memadai. Jika persoalan tersebut tidak ditangani, digitalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan pelayanan. Di sisi lain, integrasi data antarinstansi diperlukan agar pelayanan menjadi lebih sederhana, cepat, dan

tidak tumpang tindih. Perlindungan data pribadi juga menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat hanya akan menerima layanan digital negara apabila hak, keamanan, dan privasinya dijamin dengan baik.

Secara keseluruhan, administrasi negara pada era Society 5.0 perlu diarahkan pada tata kelola yang humanis, inklusif, kolaboratif, aman, dan akuntabel. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai pelayanan publik dan keadilan sosial. Strategi yang diperlukan mencakup penguatan SPBE, peningkatan kompetensi aparatur, pemerataan infrastruktur digital, perlindungan data pribadi, serta koordinasi antarlembaga. Dengan langkah tersebut, Society 5.0 dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk membangun administrasi negara yang lebih modern, efektif, dan berpihak pada masyarakat. Kesimpulan tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tidak boleh diukur dari banyaknya layanan digital yang dibuat, tetapi dari kemampuan negara memperbaiki pengalaman warga, mengurangi beban administratif, mempercepat penyelesaian masalah, dan menjaga kepercayaan publik. Apabila aspek manusia diabaikan, Society 5.0 berisiko menjadi konsep teknologis yang jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, kebijakan digital perlu terus dievaluasi secara terbuka, terukur, berkelanjutan, dan adil secara nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat, serta para peneliti terdahulu yang telah menyediakan berbagai sumber literatur yang menjadi referensi dalam penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan pengembangan organisasi di instansi pemerintah.

References

- Afdila, A., & Adnan, M. F. (2022). Digitalisasi administrasi publik sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 27–32.
- Alfarizi, M. (2024). Praktik transformatif e-government tingkat lokal era Society 5.0 untuk tata kelola daerah berkelanjutan: Teropong ekosistem intelektual sistematis. *Nusantara Innovation Journal*, 3(1), 97–121.
- Deguchi, A., Hirai, C., Matsuoka, H., Nakano, T., Oshima, K., Tai, M., & Tani, S. (2020). What is Society 5.0? Dalam Hitachi-UTokyo Laboratory (Ed.), *Society 5.0: A people-centric super-smart society* (hlm. 1–23). Springer Singapore.
- Fukuda, K. (2020). Science, technology and innovation ecosystem transformation toward Society 5.0. *International Journal of Production Economics*, 220, 107460.
- Guenduez, A. A., Demircioglu, M. A., Mueller, E. M., & Cinar, E. (2025). Digital innovation strategies in the public sector. *Research Policy*, 54(8), 105274.
- Haug, N., Dan, S., & Mergel, I. (2024). Digitally-induced change in the public sector: A systematic review and research agenda. *Public Management Review*, 26(7), 1963–1987.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55, 102180.
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi pemerintahan digital: Tantangan dalam perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506.
- Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: Guidelines for academic practice. *Review of Managerial Science*, 16(8), 2577–2595.
- Liva, G., Codagnone, C., Misuraca, G., Gineikyte, V., & Barcevicius, E. (2020). Exploring digital government transformation: A literature review. Dalam *Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance* (hlm. 502–509). Association for Computing Machinery.

- Lukman, S., & Hakim, A. (2024). Agile governance, digital transformation, and citizen satisfaction moderated by political stability in Indonesia's socio-political landscape. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 11(1), 210–228.
- Mensah, I. K., Zeng, G., & Mwakapesa, D. S. (2022). Understanding the drivers of the public value of e-government: Validation of a public value e-government adoption model. *Frontiers in Psychology*, 13, 962615.
- Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. B. (2021). Agile: A new way of governing. *Public Administration Review*, 81(1), 161–165.
- Mourtzis, D., Angelopoulos, J., & Panopoulos, N. (2022). A literature review of the challenges and opportunities of the transition from Industry 4.0 to Society 5.0. *Energies*, 15(17), 6276.
- Narvaez Rojas, C., Alomia Peñafiel, G. A., Loaiza Buitrago, D. F., & Tavera Romero, C. A. (2021). Society 5.0: A Japanese concept for a superintelligent society. *Sustainability*, 13(12), 6567.
- Nasution, M. S., Syahza, A., Rusli, Z., Mayarni, Mashur, D., Zulkarnaini, & Ananda, F. (2025). Public administration in the era of digital and collaborative governance: A bibliometric analysis. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 121–142.
- Nasution, V. I. A., Yuliani, I., Akadira, T., & Saleha, E. (2024). Transforming governance: Indonesia's digital leap from bureaucracy to big data in the era of Society 5.0. Dalam *Proceedings of the 6th Open Society Conference (OSC 2024)*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (hlm. 190–198). Atlantis Press.
- Novianto, N. (2023). Systematic literature review: Models of digital transformation in the public sector. *Policy & Governance Review*, 7(2), 170–194.
- Nurhidayat, N., Nurmandi, A., & Misran, M. (2024). Evaluation of the challenges of e-government implementation: Analysis of the E-Government Development Index in Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(2), 371–383.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
- Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review*, 29(4), 101717.
- Peters, M. D. J., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBIC Evidence Synthesis*, 18(10), 2119–2126.
- Rahman, F. (2021). Kerangka hukum perlindungan data pribadi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81–102.
- Randles, R., & Finnegan, A. (2023). Guidelines for writing a systematic review. *Nurse Education Today*, 125, 105803.
- Sakti, F. T. (2020). Sistem Administrasi Negara Indonesia. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sarjito, A., & Djati, S. P. (2025). Implikasi kompetensi digital Aparatur Sipil Negara milenial terhadap reformasi birokrasi digital di era transformasi pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 87–109.
- Setyawan, Y. F., Gumilar, A., Apriliani, I., & Bhaskoro, F. (2025). Nexus between digital competency level and performance level of State Civil Apparatus. *Journal La Sociale*, 6(2), 293–308.
- Silitonga, M. S. (2023). The public sector's digital skills gap in Indonesia: The challenges and opportunities. *Jurnal Good Governance*, 19(1), 70–80.
- Sugiono, S. (2021). The role of e-government in building Society 5.0: A conceptual review of economics, social, and environmental sustainability aspect. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(2), 115–125.
- Sun, L., Zhang, H., & Fang, C. (2021). Data security governance in the era of big data: Status, challenges, and prospects. *Data Science and Management*, 2, 41–44.

- Sutrisno, E., Silitonga, M. S., Yusuf, R. R., & Nugroho, A. A. (2024). Digital divide: How is Indonesian public service affected? JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(3), 454–463.
- Wulandari, S. (2023). Penguatan reformasi birokrasi di Indonesia menuju era Society 5.0. Jurnal Public Relations (J-PR), 4(2), 51–61.
- Yasa, A., Suswanta, Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Strengthening bureaucratic reform towards Society 5.0 era in Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20(1), 27–42.
- Zainudin. (2025). Digital ID policy in support of digital transformation in Indonesia. Jurnal Bina Praja, 17(1), 1–18.